

## PERAN GURU PPKN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA SEBAGAI RESPON DAN TANTANGAN ABAD KE-21

Harry Sugara<sup>1</sup>, Fitri Mutmainnah<sup>2</sup>

Dosen Program Studi PPKn Universitas Kahuripan Kediri

<sup>1</sup>[harry@kahuripan.ac.id](mailto:harry@kahuripan.ac.id), <sup>2</sup>[fitri.75@kahuripan.ac.id](mailto:fitri.75@kahuripan.ac.id)

### Abstrak

Tantangan bagi guru PPKn di era informasi seperti sekarang menjadi lebih berat karena perubahan – perubahan yang sangat cepat dan terjadi dalam skala global. Perubahan – perubahan tersebut terjadi pada sektor teknologi hingga ekonomi. Hal yang pasti dari perubahan – perubahan tersebut adalah pengaruhnya pada setiap aspek kehidupan khususnya peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respon dari perubahan-perubahan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, menggambarkan, serta mendeskripsikan peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respon dan tantangan abad ke-21 di SMP Muhammadiyah 1 Pare. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran guru PPKn di lingkungan sekolah semakin kompleks dan memberikan pengaruh yang besar dalam membangun karakter bangsa. Guru PPKn saat ini berperan tidak hanya sebagai penyampai materi yang inovatif dan kreatif tetapi juga sebagai teladan yang bisa memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi.

**Kata Kunci:** *Peran Guru PPKn, Karakter Bangsa, Abad 21*

### PENDAHULUAN

Abad ke-21 disebut sebagai era informasi. Laju perkembangan informasi mengubah dunia begitu cepat dalam kategori *mega speed*. Perubahan-perubahan ini telah memunculkan berbagai permasalahan yang tidak hanya dialami oleh satu negara, tetapi menjadi permasalahan lintas negara. Menurut Cogan (1998:7-10), terdapat tiga permasalahan global utama yang menjadi tantangan negara di seluruh dunia terkait dengan perkembangan abad ke-21, yakni (1) berkembangnya ekonomi global, (2)

semakin pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi, dan (3) meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan.

Dalam bidang ekonomi, munculnya bias yang luar biasa antara negara yang kaya dengan negara yang miskin. Negara maupun masyarakat yang lemah secara ekonomi akan semakin tertindas oleh gempuran globalisasi. Ada rasa yang kuat meningkatkan ketidakberdayaan warga dalam menghadapi kekuatan global. Misalnya, menurut Jamieson

terdapat tiga orang terkaya dunia memiliki asset pribadi yang lebih besar dari produk nasional gabungan dari 48 negara termiskin (Tafese, 2018:18). Disisi lain, munculnya tantangan liberalisasi ekonomi dan politik suatu bangsa serta berkembangnya ekonomi global menyebabkan pergeseran secara bertahap dari produksi barang-barang manufaktur menuju layanan atau jasa. Distribusi produksi barang dan jasa semakin gencar melewati batas negara. Globalisasi ekonomi yang didorong oleh "neo-liberalisme" secara tidak langsung mempengaruhi hidup warga negara dunia dengan membangun sistem "kapitalisme global" (Woodley, 2015:12).

Selain sektor ekonomi, permasalahan pada abad ke-21 yakni perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat cepat. Pada awal tahun 2002 sekitar 45% dari penduduk Inggris sudah terhubung dengan internet. Anak-anak dibawa oleh arus globalisasi ke dunia televisi dan komputer (Tafese, 2018:18). Perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung proses globalisasi (Woodley, 2015:13). Perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi hampir disetiap kehidupan masyarakat dunia. Setiap hari kita tidak bisa lepas dari internet, komputer, *handphone* dsb. Hal tersebut

menandakan bahwa arus globalisasi dari aspek teknologi dan komunikasi sudah menyentuh sampai akar masyarakat. Melalui teknologi komunikasi orang semakin mudah terhubung dengan dunia tanpa adanya sekat yang menghalangi.

Permasalahan semakin bertambahnya penduduk dan kerusakan lingkungan juga menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan. Populasi penduduk dunia terus meningkat dari hampir enam miliar pada akhir abad ke-20 akan terus meningkat delapan miliar pada tahun 2025 (Cogan, 1998:10). Populasi penduduk dunia yang semakin meningkat juga membawa dampak yang signifikan pada persoalan lingkungan, misalnya kebutuhan air bersih yang semakin meningkat, kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat dan sebagainya.

Untuk merespon berbagai persoalan tersebut, perlu adanya pendidikan yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dapat melunturkan jari diri bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam tataran praktik menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tahun-tahun terakhir mengalami degradasi yang mengkhawatirkan, bahkan nilai-nilai kearifan lokal juga tergerus oleh pendidikan global. Kondisi ini berakibat pada dekadensi moral, menipisnya tata karma, etika bahkan

sampai pada menurunnya kreativitas anak bangsa.

Seperti halnya di Indonesia, dekadensi moral menjadi potret buram dalam dunia pendidikan yang dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Berdasarkan data KPAI selama bulan Januari hingga April 2019 pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yakni kasus berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual (Lisye, 2019). Berdasarkan data tersebut, jelas terlihat bahwa karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila masih harus dibumikan. Pendidikan harus memiliki andil yang jelas dan terarah. Pendidikan idealnya menjadi sebuah pencerah bagi bangsa yang dihadapkan pada kejumudan. Hal ini sejalan dengan Tasso, dkk (2017:41) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan obor yang menerangi jalan manusia dengan tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sikap spiritual serta kebenaran dalam karakter.

Untuk itu, pendidikan dijadikan ujung tombak utama dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam mendukung pendidikan yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017

tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Melalui program ini diharapkan dapat mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membangun karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam kurikulum 2013 telah dibebankan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Akan tetapi mata pelajaran yang diberikan tanggung jawab lebih besar ada pada mata pelajaran PAI dan PPKn. Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik dalam mempersiapkan warga negara (peserta didik) untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Guru mata pelajaran PPKn sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) tidak hanya berperan dalam upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai baik yang bermanfaat bagi peserta didik dalam membangun karakter. Akan tetapi juga harus mampu mengajarkan PPKn dalam bingkai perspektif global. Pentingnya PPKn global didasarkan atas dua alasan penting yakni *pertama*, meningkatnya populasi imigran yang menyebabkan keberagaman bahasa, budaya, dan etnis. *Kedua*, globalisasi telah meningkatkan keterkaitan antar negara-negara, terutama di bidang keamanan, ekonomi, budaya, teknologi, kesehatan dan perdamaian.

Dalam konteks ini para guru harus berkompoten untuk mendidik peserta didik secara intelektual dan moral untuk mengkritisi isu-isu global yang kompleks dan kontroversial dan bertindak sebagai warga global yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan serta mempromosikan pemikiran holistik dan pemahaman lintas budaya.

Pembelajaran PPKn memiliki misi sebagai pendidikan karakter yang bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*), yakni menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan peran guru sebagai sentral utama dalam membangun karakter peserta didik di sekolah. Di sisi lain guru PPKn harus merubah paradigma dalam pembelajaran bahwa seorang guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik. Hal ini penting untuk dilakukan dalam menunjang proses pembelajaran yang menarik sehingga mampu membangun karakter peserta didik. Sejalan dengan ini Wiwin (2017:535) menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Untuk itu peran guru harus dilaksanakan secara aktif dan mampu memposisikan dirinya sebagai tenaga professional sesuai dengan tantangan abad ke-21.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, guru PPKn berperan dalam pembentukan sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan Branson dalam Mulyono (2017:220) bahwa PPKn berfungsi untuk membentuk karakter kewarganegaraan, seperti menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu, berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Untuk mewujudkannya maka seorang guru PPKn harus mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan memungkinkan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat global atau abad ke-21.

Reynolds, dkk (2017: 10), mengemukakan bahwa di abad ke-21 guru memiliki tantangan dan tanggungjawab kepada peserta didik untuk membekali pengetahuan yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang pada tataran global. Guru

harus mampu mengadopsi isu global ke dalam praktik pembelajaran kelas, mengapresiasi perbedaan kultur serta mampu mengembangkan resolusi konflik atas dasar prinsip keadilan. Berkaca dari uraian tersebut guru memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Yang paling menentukan bukanlah *"the gun"*, tetapi *"man behind the gun"*. Jadi guru merupakan salah satu aktor yang sangat penting. Guru PPKn abad ke-21 harus mampu mendidik peserta didik di sekolah menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respon dan tantangan abad ke-21.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, menggambarkan, serta mendeskripsikan peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respon dan tantangan abad ke-21 di SMP Muhammadiyah 1 Pare.

*Setting* penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dirincikan oleh

adanya 3 unsur, yaitu: 1) pelaku; 2) tempat; dan 3) kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi atau tempat penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Pare Kabupaten Kediri. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PPKn, dan peserta didik. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 4 April sampai 4 Mei 2019.

Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan, karena peneliti sendiri merupakan alat instrumen pengumpul data yang utama (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* (teknik sampel bertujuan). Dalam penggunaan *purposive sampling* peneliti akan mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari dua sumber yaitu: data primer dan data sekunder. Sugiyono (2016: 225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi sumber merupakan teknik keabsahan data yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek apakah data yang diperoleh dari suatu sumber data yang berbeda dapat menghasilkan data yang sama ketika dibandingkan dengan sumber data yang lain (Moleong, 2014: 330-331).

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggambarkan peran pembelajaran PPKn secara langsung di SMP Muhammadiyah 1 Pare dalam membentuk karakter bangsa sebagai respon dan tantangan abad ke-21. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, display data, pengambilan simpulan dan verifikasi data* (Moleong, 2014: 288).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respons dan tantangan abad ke-21**

Fullan dan Scott (2014: 6) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses untuk

mengembangkan kualitas individu menjadi pribadi yang efektif, ulet, tekun, tahan, handal dan jujur. Sejalan dengan definisi tersebut Irawatie, dkk (2019: 35) menyebutkan bahwa program pendidikan karakter fokus pada pembangunan sosial, emosional dan personal. Dalam program ini peserta didik belajar menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, bertanggung jawab, bekerjasama dengan orang lain, memecahkan sebuah permasalahan, jujur, dan dapat dipercaya. Karakter yang baik tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi dikembangkan dari waktu ke waktu melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Untuk itu, pendidikan karakter penting diajarkan kepada peserta didik dan sekolah harus mengeksplicitkannya ke dalam kurikulum. Kebijakan pendidikan harus mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Muttaqin dkk, (2018: 110) menyatakan bahwa secara bersama-sama orang tua, guru, administrator dan stakeholder harus bergabung untuk mendorong peserta didik mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam hidup mereka. Pendidikan karakter berusaha untuk membantu peserta didik berkembang menjadi orang yang penuh dengan kebajikan (Irawatie dkk, 2019: 29). Hal tersebut senada dengan pendapat Umami, dkk. (2019: 379), bahwa salah satu tujuan

diajarkannya pendidikan karakter di persekolahan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan perilaku luhur yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa digunakan untuk berpartisipasi di dunia global.

Prospek PPKn untuk membangun karakter bangsa menduduki posisi yang sangat sentral. PPKn merupakan upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik, yakni memiliki penalaran moral untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan publik maupun privat. PPKn tidak dapat dilepaskan dari perspektif moralitas dan keutuhan pembangunan karakter warga negara (Singh, 2019: 2).

Secara objektif dari sudut pandang keilmuan, PPKn memiliki porsi yang besar untuk pembangunan karakter warga negara. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa dinamika PPKn pada fasenya sebagai pendidikan moral yang dalam kurikulum formal dikenal sebagai Pendidikan Moral Pancasila (PMP) gagal dalam mengemban pendidikan nilai. Pada fase tersebut, secara substantif tidak benar-benar sebagai pendidikan moral, akan tetapi lebih menekankan pada moralitas privat dan cenderung mengabaikan persoalan etika publik, seperti kasus korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, hegemoni

ekonomi oleh kaum konglomerat dan sebagainya. Output proses pembelajaran cenderung menekankan pada hafalan verbal.

Paradigma baru PPKn mengalami transformasi dalam beberapa aspek seperti, visi, misi, substansi materi, dan strategi pengajaran. Di sisi lain, adanya upaya untuk mengembalikan PPKn ke dalam jalur ilmu sebagai bidang kajian terbuka dan independen dari intervensi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan paradigma baru tersebut, PPKn diharapkan mampu berperan dalam merekonstruksi persoalan yang muncul pada abad 21 melalui pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Seiring berjalannya waktu, PPKn mulai menampakkan jati dirinya. Struktur keilmuan PPKn dilihat dari aspek kompetensi, evaluasi, strategi, metode telah menampakkan karakter yang jauh lebih ideal daripada daripada fase sebelumnya. Dalam Kurikulum 2013 (K-13), aspek pembentukan karakter peserta didik sangat diperhatikan. K-13 mengamanatkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan domain sikap, pengetahuan dan keterampilan yang

selanjutnya dituangkan ke dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL), baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK. Dari Standar Kompetensi Lulusan tersebut diuraikan dalam Kompetensi Inti (KI) yang terdiri dari KI sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Selanjutnya Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar yang meliputi KD yang berasal dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam K-13 aspek pembentukan sikap lebih diprioritaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri K-13 bahwa selalu mengaitkan antar sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu konteks pembelajaran. Dengan demikian, dalam satu proses pembelajaran peserta didik akan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara bersama-sama. Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam K-13 akan terbangun pendidikan karakter secara otomatis, karena penanaman nilai-nilai karakter terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran (Muttaqin dkk, 2018: 105).

Komalasari & Saripudin (2018: 397) pembangunan karakter bangsa melalui PPKn dapat dijelaskan bahwa PPKn membutuhkan landasan pendidikan karakter dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Hal

tersebut didasarkan atas argumen, bahwa karakter kewargaan yang terbentuk dari hasil kolaborasi antara PPKn dan pendidikan karakter memiliki banyak dimensi seperti, keadilan sosial, kejujuran, tanggung sosial maupun personal, kesetaraan dan lain sebagainya. Kecakapan dari pendidikan karakter dapat diaplikasikan dalam PPKn seperti kecakapan dasar emosional-sosial dalam bentuk manajemen diri dan kompetensi sosial yang diperlukan dalam kehidupan sosial yang efektif. Tujuan bersama dari PPKn dan pendidikan karakter adalah untuk mendorong pengembangan warga negara yang baik pro-sosial dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Untuk itu diperlukan sintesis antara filsafat, metode dan tujuan agar PPKn dan pendidikan karakter dapat mendorong terbentuknya warga negara yang baik (Chowdhury, 2016: 6).

Prospek PPKn dalam rangka pembangunan karakter bangsa sangat penting terutama untuk merespon berbagai transformasi abad ke-21 yang semakin "berbahaya", baik aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Transformasi ini membawa dampak terhadap bangsa dan negara, baik dampak positif maupun negatif. Di sisi lain, munculnya persoalan-persoalan bangsa yang tidak bisa dianggap remeh, seperti ancaman

disintegrasi nasional, bobroknya moral elite politik, anarkhis sosial, korupsi, berkembangnya paham neo-liberalisme, menjamurnya budaya asing, isu SARA perlu mendapatkan penanganan yang serius dari berbagai pihak, khususnya pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, upaya serius untuk mengatasi persoalan tersebut yakni melalui pengajaran PPKn di persekolahan. Keberhasilan PPKn dalam merekonstruksi persoalan abad ke-21 tidak terlepas dari peran guru yang profesional.

Guru profesional mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan karakter bangsa. Guru sebagai aktor yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan merancang skenario pembelajaran serta mengorganisasikan media, metode dan strategi pembelajaran, sehingga PPKn sebagai pioner pembangunan karakter bangsa dapat terealisasi. Di sisi lain, dengan menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka guru PPKn mampu melaksanakan program pembangunan karakter peserta didik sebagai respons dan tantangan abad ke-21 yang merupakan era serba digital termasuk bidang pendidikan. Secara lebih rinci peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respons dan tantangan abad

ke-21 di SMP Muhammadiyah 1 Pare diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, peran guru sebagai pemegang amanah dalam memahami nilai-nilai karakter yang akan dibangun untuk peserta didik. Sebagai pemegang amanah guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas mengajar, membimbing, serta mendidik peserta didik dengan penuh tanggung jawab. Mengajar dalam artian bahwa guru PPKn menjalankan peran dalam memberikan pengajaran mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak dibangun dan dikembangkan. Selanjutnya membimbing berarti bahwa guru PPKn menjalankan peran dalam mengarahkan peserta didik untuk memiliki karakter yang kuat. Dalam hal mendidik maka guru PPKn berperan dalam memberikan motivasi untuk belajar membangun karakter sesuai dengan ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan antara guru dengan peserta didik.

Peran guru PPKn sebagai pemegang amanah mampu berjalan efektif jika didukung dengan pemahaman konsep yang luas terhadap nilai-nilai karakter yang akan dibangun dan dikembangkan pada peserta didik. Pemahaman ini diperoleh guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare dengan berbagai kegiatan yang dilakukan,

seperti mengikuti kegiatan MGMP, *workshop*, seminar, serta mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang menunjang pengembangan karakter. Dengan pemahaman konsep nilai-nilai karakter yang matang mampu mempermudah guru dalam menuangkan baik di kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran.

Dalam membangun karakter maka seorang guru PPKn harus memberikan kesadaran pada peserta didik untuk memahami dan bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu dalam mendukung peran guru PPKn sebagai pemegang amanah maka harus ditunjang dengan beberapa sikap dimiliki, antara lain (1) memiliki komitmen dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan cita-cita peserta didik, (2) menjunjung sikap jujur sebagai jantungnya karakter, (3) memiliki kompeten dalam menyelenggarakan pembelajaran dan kemampuan memecahkan berbagai masalah, (4) konsisten dalam artian sebagai guru PPKn harus fokus pada mata pelajaran sehingga mampu memiliki konsentrasi kajian yang mendalam.

*Kedua*, peran guru PPKn sebagai perancang perangkat pembelajaran berbasis karakter. Disini guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare berperan aktif dalam merancang perangkat pembelajaran berbasis

karakter dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah perangkat pembelajaran yang dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam indikator pembelajaran, metode dan model pembelajaran, media yang digunakan, materi pembelajaran, serta bentuk evaluasi pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan adanya perangkat pembelajaran berbasis karakter tentunya mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

*Ketiga*, peran guru PPKn sebagai pelaksana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Peran guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dilakukan dengan: (a) guru sebagai pengelola kelas yang berperan dalam memegang kendali penuh atas iklim dalam suasana pembelajaran yang mendukung penanaman karakter bangsa; (b) guru sebagai fasilitator yang berperan memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk dapat mempermudah peserta didik menerima materi serta penanaman karakter bangsa; (c) guru sebagai mediator berperan menjadi perantara dalam hubungan antarmanusia agar mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang syarat akan nilai-nilai karakter; (d) sebagai

demonstrator guru berperan menjadi sosok yang menunjukkan sikap yang mengandung nilai-nilai karakter bangsa yang akan menginspirasi peserta didik untuk melakukan hal yang sama, dan bahkan lebih baik; (e) sebagai pendorong kreatifitas guru berperan memberikan motivasi pada peserta didik; serta (f) sebagai evaluator guru harus mampu mengevaluasi semua hasil yang telah dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan, efektivitas dan efisiensi dalam menguasai tujuan pembelajaran.

Pembangunan karakter bangsa yang efektif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas didukung dengan penggunaan model pembelajaran yang inovatif seperti *discovery learning*, *problem based learning*, *role playing*, *problem solving*, dan *demonstration*. Selain pembelajaran inovatif, pembelajaran aktif dengan menggunakan pendekatan CTL pada aktivitas pembelajaran yang mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi mampu mendukung terinternalisasinya nilai-nilai karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran di dalam kelas yang menekankan pada pembentukan karakter peserta didik melalui keterlibatan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran

(*student center*). Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga dengan mudah nilai-nilai karakter bangsa dapat dibangun dan dikembangkan.

*Keempat*, peran guru PPKn sebagai teladan dalam membangun karakter bangsa. Dalam hal ini guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare mengadopsi konsep pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara dengan semboyan "*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*". Semboyan ini menggambarkan bahwa peran guru sebagai teladan bagi peserta didiknya. Peran guru tidak sekedar sebagai pengajar yang mentransferkan ilmu pengetahuan tetapi juga pendidik yang berusaha membangun karakter pada peserta didiknya. Guru menjadi *role model* bagi peserta didik dalam mewujudkan perilaku berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati dan olah rasa.

Peran guru PPKn di lingkungan sekolah semakin kompleks dan memberikan pengaruh yang besar dalam membangun karakter bangsa. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan tri pusat pendidikan yang di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Konsep ini dikenal dengan cara mendidik

yang diterapkan di Taman Peserta didik, yang meliputi: (a) sistem among yang berarti mengemong peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik tetapi guru akan selalu mengawasi tindakan yang dilakukan dengan baik; (b) tut wuri handayani yang berarti pemimpin mengikuti dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak yang dipimpinnya, tetapi handayani, mempengaruhi dengan daya kekuatan, kalau perlu dengan paksaan dan kekerasan apabila kebebasan yang diberikan itu di pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik; (c) tringa yang meliputi *ngarti*, *ngrasa*, dan *nglakoni*. Konsep ini berupaya untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai yang baik, cita-cita hidup dan pemahaman seseorang haruslah dapat dimengerti sehingga mampu diolah pikir dan diimplementasikan dalam bentuk nyata melalui perbuatan. Karena tahu dan mengerti saja tidak cukup jika belum diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Berbagai sumber keteladanan guru PPKn antara lain dengan menunjukkan etos kerja tinggi, memakai pakaian yang rapi, memiliki kecerdasan dan kreatif dalam belajar, datang ke sekolah tepat waktu, memberikan kasih sayang pada peserta didik, mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, menjaga kebersihan, serta memiliki rasa

kepedulian terhadap sesama. Dalam menunjang pembangunan karakter melalui keteladanan harus ditunjang dengan menjalin kedekatan dengan peserta didik. Kedekatan disini dalam artian mampu menciptakan hubungan batin dan keakraban dengan peserta didik sehingga peserta didik berani berkomunikasi dan bahkan berani untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang tidak dipahaminya. Melalui kedekatan antara guru dan peserta didik maka peserta didik akan memahami kebijakan guru, sikap dan perilaku guru dalam memberikan pengajaran sehingga mampu memicu inspirasi dalam diri peserta didik untuk meniru dan membangun karakter dalam diri peserta didik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter nasional dalam upaya mempertahankan eksistensi negara-bangsa. PPKn merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya nasional, yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa. Upaya pembangunan karakter bangsa dalang lingkup pendidikan tidak terlepas dari peran guru sebagai agen pembelajaran.

Perubahan-perubahan yang terjadi terutama yang berhubungan

dengan dunia digital membuat tantangan di dunia pendidikan menjadi lebih beragam dan lebih berat. Peserta didik sekarang sudah terhubung dengan berbagai hal di dekat maupun yang jauh dari mereka melalui gawai mereka. Hal baik yang didapat melalui gawai mereka dapat membantu guru membentuk karakter mereka sementara hal buruk seperti isu SARA, korupsi, intoleransi, dll menjadi tantangan bagi guru untuk membuat peserta didik memahami bagaimana menyikapi hal-hal tersebut. Karakter bangsa diperlukan dalam menyikapi kedua hal tersebut.

Langkah-langkah pembentukan karakter bangsa di dunia pendidikan tertuang dalam kurikulum K-13 yang memfokuskan pada untuk domain sikap, pengetahuan dan keterampilan. Khusus untuk sikap spiritual dan sikap sosial, guru sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator yang dapat memberi contoh kepada para peserta didik bagaimana membentuk karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia sekaligus sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun peran guru PPKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respons dan tantangan abad ke-21 dalam penelitian ini ialah:

1. Peran guru sebagai pemegang amanah dalam memahami

nilai-nilai karakter yang akan dibangun untuk peserta didik.

2. Peran guru PPKn sebagai perancang perangkat pembelajaran berbasis karakter.
3. Peran guru PPKn sebagai pelaksana pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
4. Peran guru PPKn sebagai teladan dalam membangun karakter bangsa.

Peran-peran yang disebutkan di paragraph sebelumnya telah dipraktekkan oleh guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare dengan cara mengadopsi konsep pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara dengan semboyan "*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*". Konsep yang sudah ada sejak puluhan tahun tersebut ternyata masih relevan dengan perkembangan yang terjadi pada era modern. Ini terbukti dengan bagaimana guru di PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare menerapkan konsep tersebut dalam membentuk karakter bangsa.

Guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare memegang penuh kendali dalam merancang pembelajaran sejak dari menyiapkan materi pembangunan karakter bangsa sampai penentuan metode mengajar yang dirasa sesuai dengan materi yang diajarkan. Metode yang paling sering digunakan adalah *problem based* yang

diikuti dengan *problem solving*. Sementara metode yang paling sedikit digunakan adalah *role play*. Se jauh ini metode yang digunakan efektif membentuk peserta didik sesuai dengan karakter bangsa.

Pertimbangan utama guru PPKn di SMP Muhammadiyah 1 Pare dalam menentukan metode yang digunakan adalah materi yang diajarkan. Sebagai contoh, metode *problem solving* digunakan pada sub materi "efek hoaks pada pembentukan opini seseorang" dengan pertimbangan kebanyakan peserta didik masih belum dapat menentukan sikap apa yang harus diambil dalam menyikapi sebuah hoak. Se jauh ini metode yang dipilih bisa dikategorikan sesuai dengan yang diperlukan.

Dengan adanya pembangunan karakter bangsa, diharapkan warga negara Indonesia mencerminkan warga yang mampu mempraktikkan nilai-nilai budaya nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, setiap warga negara mampu menghadapi tantangan abad ke-21 yang semakin massif berkembang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik tantangan sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chowdhury, M. 2016. Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. *The Malaysian Online Journal of Educational Science*, 4 (2), 1-16.
- Cogan, J.J. 1998. Citizenship education for the 21<sup>st</sup> century: setting the context. Dalam J.J Cogan & R. Derricot (Penyunting), *Citizenship for the 21<sup>st</sup> century: an international perspective on education* (hlm. 1-20). London: Kogan Page Limited.
- Fullan, M., & Scott, G. 2014. *New pedagogies for deep learning whitepaper: Education PLUS*. Seattle: Collaborative Impact SPC.
- Irawatie, A. Iswahyuni. & Setyawati, M.A. 2019. Education learning development of character education-based state defense. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (2), 27-42.
- Komalasari, K. & Saripudin, D. 2018. The influence of living values education-based civic education textbook on student's character formation. *International Journal of Instruction*, 11 (1), 395-410.
- Lisye, S.R. 2019. KPAI: angka kekerasan pada anak Januari-April 2019 masih tinggi. detikNews:

- <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, B. 2017. Reorientasi *civic disposition* dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14 (2), 218-225.
- Muttaqin, M.F., Raharjo, T.J, & Masturi. 2018. The implementation main values of character education reinforcement in elementary school. *Journal of Primary Education*, 7 (1), 130-112.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Pipit, W. 2016. Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13 (2), 188-198.
- Reynolds, R., Notari, M., & Tavares, N.J. 2017. Twenty-first century skills and global education roadmaps. ResearchGate.
- Singh, B. 2019. Character education in the 21<sup>st</sup> century. *IJSS*, 15 (1), 1-8.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tafese, G.S. 2018. Assessment of challenges to civics and ethical education in Ethiopian secondary schools. *Journal of Education and Practice*, 9 (4), 16-20.
- Tasso, C., Robertson, R.W., Allen, P., & Withey, P. 2017. A global learning-centered approach to higher education: workplace development in the 21st century. *Tecnologia Ciencia Education*, 6, 31-48.
- Umami, I., Gani, A., & Waskito, T. 2019. Proposal of character moral education for gifted young scientist in Indonesia. *Journal for the Education of Gifted Young*, 7 (2), 377-387.
- Wiwin, P.A. 2017. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan karakter disiplin peserta didik melalui pendekatan keteladanan di SMP N2 tegal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 534-545.
- Woodley, D. 2015. Globalization and capitalist geopolitics: sovereignty and state powes in a multipolar world. New York: Routledge.